



## Analisis Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan Standar GRI 400 Pada Sektor Properti

Rafil<sup>1</sup>, Muhammad Ridho<sup>2</sup>, Kornella Kitty Sitanggang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau  
e-mail: [mohd.ridho26@gmail.com](mailto:mohd.ridho26@gmail.com)  
[kornellakitty467@gmail.com](mailto:kornellakitty467@gmail.com)

Penulis Korespondensi: Rafil  
e-mail: [rafilmasseh1511@gmail.com](mailto:rafilmasseh1511@gmail.com)

### ARTIKEL INFO

#### Artikel History:

Menerima: 18 Jan 2026  
Diterima: 29 Mei 2026  
Tersedia Online: 31 Mei 2026

#### Kata Kunci:

Sustainability Report,  
GRI 400,  
Pengungkapan Sosial,  
Sektor Properti

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan sustainability report berdasarkan standar GRI 400 pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan analisis konten (content analysis) terhadap laporan keberlanjutan periode 2024. Pengukuran tingkat pengungkapan dilakukan dengan menggunakan indeks pengungkapan GRI 400 yang mencakup 36 indikator aspek sosial. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti rata-rata hanya mengungkapkan 28% indikator GRI 400. Nilai minimum sebesar 0 menunjukkan adanya perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan aspek sosial sama sekali, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa belum terdapat perusahaan yang mengungkapkan seluruh indikator GRI 400 secara lengkap. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,26 menunjukkan adanya variasi pengungkapan yang cukup tinggi antar perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan aspek sosial dalam sustainability report perusahaan sektor properti masih belum merata dan belum komprehensif. Diperlukan peningkatan komitmen perusahaan serta penguatan peran regulator dalam mendorong pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar Global Reporting Initiative

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received: 18 Jan 2026  
Accepted: 29 May 2026  
Available Online: 31 May 2026

#### Keywords:

Sustainability Report,  
GRI 400,  
Social Disclosure,  
Property Sector

### ABSTRACT

*This study aims to analyze sustainability report disclosures based on the GRI 400 standards in property sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The study used content analysis of sustainability reports for the 2024 period. Disclosure levels were measured using the GRI 400 disclosure index, which covers 36 social aspect indicators. The results show that property sector companies, on average, disclose only 28% of the GRI 400 indicators. A minimum value of 0 indicates that some companies do not disclose social aspects at all, while a maximum value of 0.75 indicates that no company has fully disclosed all GRI 400 indicators. Furthermore, a standard deviation value of 0.26 indicates significant variation in disclosure across companies. These findings indicate that social aspect disclosure practices in property sector companies' sustainability reports are still uneven and incomplete. Increased corporate commitment and a strengthened role of regulators are needed to encourage sustainability reporting in accordance with Global Reporting Initiative standards.*



## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan praktik bisnis modern menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keberlanjutan. Sustainability report menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Global Reporting Initiative (GRI) hadir sebagai standar internasional yang memberikan pedoman terstruktur bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan secara transparan, konsisten, dan dapat dibandingkan (Global Reporting Initiative, 2021).

Salah satu aspek penting dalam standar GRI adalah dimensi sosial yang dirangkum dalam GRI 400, yang mencakup isu ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, serta dampak sosial terhadap masyarakat. Pengungkapan aspek sosial ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, perlindungan hak-hak individu, serta kontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan aspek sosial dalam sustainability report masih bersifat sukarela, tidak merata, dan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan (Guthrie & Abeysekera, 2006; Raar, 2002).

Selain sebagai sarana komunikasi kepada pemangku kepentingan, sustainability report juga berfungsi sebagai alat legitimasi perusahaan di mata publik. Deegan (2019) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering digunakan sebagai upaya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Pandangan ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Freeman (1984), yang menegaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitasnya. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan dalam membangun kepercayaan dan dukungan sosial.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan sustainability report masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pemahaman terhadap standar, keterbatasan sumber daya, serta belum kuatnya regulasi yang bersifat mengikat menyebabkan banyak perusahaan menyajikan laporan keberlanjutan secara minimalis. Guthrie dan Abeysekera (2006) serta Raar (2002) menemukan bahwa pengungkapan sosial perusahaan cenderung bersifat sukarela dan tidak dilakukan secara merata antar perusahaan. Lebih lanjut, Hahn dan Kühnen (2013) menegaskan bahwa tekanan dari pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan, bukan semata-mata kesadaran internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar pelaporan telah tersedia, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan strategis perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. Gunawan (2015) serta Tarigan dan Semuel (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung lebih menekankan isu-isu yang berdampak langsung terhadap reputasi perusahaan, sementara pengungkapan aspek sosial yang lebih mendalam belum menjadi prioritas utama. Hermawan dan Mulyawan (2014) juga menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sustainability report belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana akuntabilitas sosial yang utuh.

Lebih spesifik, penelitian yang menelaah standar GRI 400 menunjukkan bahwa aspek sosial masih menjadi bagian yang paling lemah dalam praktik pelaporan keberlanjutan. Pratiwi dan Prabowo (2021) menemukan bahwa indikator-indikator GRI 400 pada perusahaan non-

keuangan belum diungkapkan secara menyeluruh. Sementara itu, Sari et al. (2022) menunjukkan adanya ketimpangan pengungkapan sosial antar perusahaan, termasuk pada sektor energi dan properti. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun perusahaan telah mengadopsi standar GRI, implementasi indikator aspek sosial masih belum konsisten dan belum mencerminkan prinsip transparansi yang diharapkan.

Penelitian mengenai sustainability report di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan memiliki implikasi strategis terhadap kinerja perusahaan. Azmi, Violeta, dan Suci (2025) menemukan bahwa secara simultan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam sustainability report berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun secara parsial hanya aspek lingkungan yang terbukti berpengaruh signifikan, temuan tersebut menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa sustainability report bukan sekadar pelaporan formal, melainkan instrumen strategis yang dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam aspek sosial yang tercakup dalam standar GRI 400.

Sektor properti merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki dampak sosial signifikan terhadap tenaga kerja, masyarakat sekitar, serta lingkungan sosial perkotaan. Aktivitas pembangunan perumahan, kawasan komersial, dan infrastruktur berpotensi memengaruhi kondisi kerja, keselamatan tenaga kerja konstruksi, hak masyarakat terdampak, serta dinamika sosial di lingkungan sekitar proyek. Oleh karena itu, perusahaan properti memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengungkapkan bagaimana mereka mengelola dampak sosial tersebut secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengungkapan aspek sosial pada sektor ini masih relatif terbatas.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial pada perusahaan properti di Indonesia masih relatif rendah. Seperti, Lestari dan Rachmawati (2019) menemukan bahwa praktik sustainability reporting pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia belum dilakukan secara optimal. Sari et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa pengungkapan standar GRI 400 pada sektor ini masih timpang antar perusahaan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana perusahaan properti benar-benar menerapkan standar pengungkapan sosial secara memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana perusahaan mengungkapkan sustainability report telah menjadi bagian dari praktik pelaporan perusahaan, pengungkapan aspek sosial—khususnya berdasarkan standar GRI 400—masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi tingkat, kualitas, maupun kesesuaian dengan pedoman Global Reporting Initiative. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat, kualitas, serta kesesuaian pengungkapan sustainability report berdasarkan standar GRI 400 pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengungkapan aspek sosial, sekaligus menjadi masukan bagi perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Objek & Periode	Metode	Variabel	Hasil Utama
1	Guthrie & Abeysekera (2006)	Perusahaan publik Australia	Content analysis	Pengungkapan social	Pengungkapan sosial masih bersifat sukarela dan tidak merata
2	Hahn & Kühnen (2013)	Review lintas Negara	Literature review	Sustainability reporting	Tekanan stakeholder mendorong pengungkapan social
3	Violeta et al. (2025)	Perusahaan manufaktur di BEI	Kuantitatif, regresi linier berganda	sustainability report (aspek ekonomi, lingkungan, sosial)	Secara parsial hanya aspek lingkungan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun secara simultan ketiga aspek berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
4	Raar (2002)	Perusahaan publik Inggris	Content analysis	Social disclosure	Kualitas pengungkapan sosial masih rendah
5	Gunawan (2015)	Perusahaan manufaktur BEI	Statistik deskriptif	Pengungkapan GRI	Tingkat pengungkapan GRI masih terbatas
6	Hermawan & Mulyawan (2014)	Perusahaan publik Indonesia	Content analysis	Sustainability report	Pengungkapan sosial belum komprehensif
7	Tarigan & Samuel (2014)	Perusahaan di Indonesia	Deskriptif	CSR disclosure	CSR berfokus pada isu reputasi
8	Lestari & Rachmawati (2019)	Perusahaan properti BEI	Deskriptif kuantitatif	Sustainability report	Pengungkapan sosial sektor properti relatif rendah
9	Pratiwi & Prabowo (2021)	Perusahaan sektor non-keuangan BEI	Content analysis	GRI social aspect	Indikator GRI 400 belum diungkap secara menyeluruh
10	Sari et al. (2022)	Perusahaan sektor energi & properti BEI	Statistik	GRI 400	Pengungkapan sosial masih timpang antar perusahaan

Sumber: Data diolah (2025)

## 2. METODE RISET

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis konten (content analysis). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi tingkat serta kualitas pengungkapan aspek sosial dalam *sustainability report* perusahaan berdasarkan standar GRI 400, tanpa menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran tingkat pengungkapan dan kesesuaian pelaporan dengan pedoman Global Reporting Initiative.

### Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian adalah perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian adalah tahun 2024, dengan pertimbangan ketersediaan laporan keberlanjutan yang relatif konsisten dan relevan dengan perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen resmi perusahaan yang telah dipublikasikan, sehingga data yang digunakan bersifat objektif, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pengungkapan aspek sosial berdasarkan standar GRI 400. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2024. Laporan keberlanjutan tersebut dianalisis menggunakan metode *content analysis* dengan mengacu pada indikator standar GRI 400 (*Social Standards*) yang mencakup aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan tahunan (*annual report*) sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang tidak sepenuhnya disajikan dalam *sustainability report*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi masing-masing perusahaan situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) Data dikumpulkan dengan cara mengunduh dokumen laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian, kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap indikator GRI 400 untuk menilai tingkat, kualitas, serta kesesuaian pengungkapan aspek sosial. Dengan menggunakan sumber data yang berasal dari publikasi resmi perusahaan dan otoritas pasar modal, penelitian ini memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diambil dari seluruh perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Untuk mendapatkan poin yang dituju, maka digunakan kriteria sebagai berikut: (1). Perusahaan sektor properti yang terdaftar di BEI selama periode 2024. (2). Perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* secara mandiri atau terintegrasi dalam laporan tahunan. (3). Laporan keberlanjutan memuat informasi yang mengacu pada GRI Standards. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Setiap indikator GRI 400 diberi skor menggunakan metode dummy, yaitu: Skor 1 jika indikator diungkapkan dalam *sustainability report* dan Skor 0 jika indikator tidak diungkapkan. Indeks pengungkapan GRI 400 dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Indeks GRI 400} = \frac{\text{Jumlah indikator GRI 400 yang diungkapkan}}{\text{Total indikator GRI 400}}$$

Nilai indeks berada pada rentang 0–1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat pengungkapan yang semakin tinggi.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Analisis konten (*content analysis*). Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkode setiap indikator GRI 400 dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Statistik deskriptif, Digunakan untuk



menggambarkan tingkat pengungkapan GRI 400 melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Terakhir menggunakan Analisis kategorisasi tingkat pengungkapan. Indeks GRI 400 diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

Tabel 2 Nilai Indeks

NILAI INDEKS	KATEGORI
$\geq 0,80$	Tinggi
$0,60 - 0,79$	Sedang
$< 0,60$	Rendah

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan GRI Standards Pada Sektor Properti Yang Memakai Standar GRI 2021 Periode 2024

Tabel 3 Indeks Pengungkapan GRI 400

No	Kode Perusahaan	Jumlah Item Yang Diungkapkan	Total Item GRI 400	Indeks GRI 400
1	ASRI	15	36	0,14
2	BEST	12	36	0,05
3	BKDP	10	36	0
4	BSDE	23	36	0,36
5	CTRA	4	36	-0,17
6	DILD	25	36	0,41
7	DUTI	27	36	0,47
8	FMII	2	36	-0,22
9	GMTD	10	36	0
10	INPP	18	36	0,22
11	KIJA	7	36	-0,09
12	LPCK	12	36	0,05
13	LPKR	10	36	0
14	LPLI	19	36	0,25
15	PPRO	15	36	0,14
16	PWON	24	36	0,39
17	SMRA	20	36	0,28
18	RISE	17	36	0,19
19	LAND	5	36	-0,14
20	REAL	27	36	0,47
21	BBSS	7	36	-0,09
22	HOMI	5	36	-0,14
23	ADCP	25	36	0,41
24	CBDK	21	36	0,3
25	DADA	0	36	-0,28

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis konten terhadap laporan keberlanjutan perusahaan yang menjadi sampel penelitian, diperoleh data pengungkapan standar GRI 400 dengan total 36 item

indikator yang dianalisis pada masing-masing perusahaan. Tabel hasil menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam tingkat pengungkapan aspek sosial antar perusahaan.

Jumlah item GRI 400 yang diungkapkan perusahaan berada pada rentang 0 hingga 27 item dari total 36 item. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan tertinggi mampu mengungkapkan 27 item GRI 400, yang menghasilkan indeks GRI 400 sebesar 0,47, sedangkan perusahaan dengan tingkat pengungkapan terendah tidak mengungkapkan item GRI 400 sama sekali sehingga memperoleh indeks sebesar -0,28. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum melakukan pengungkapan aspek sosial GRI 400 dalam laporan keberlanjutannya.

Secara umum, sebagian besar perusahaan hanya mengungkapkan kurang dari setengah total indikator GRI 400. Perusahaan dengan pengungkapan relatif lebih tinggi berada pada kisaran indeks 0,39 hingga 0,47, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah mengungkapkan lebih dari 60% indikator sosial GRI 400. Sebaliknya, sejumlah perusahaan menunjukkan nilai indeks yang sangat rendah bahkan negatif, yang mengindikasikan rendahnya komitmen terhadap transparansi aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak asasi manusia.

Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan standar GRI 400 di kalangan perusahaan sampel belum merata dan masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Ketimpangan tingkat pengungkapan ini mencerminkan adanya perbedaan kesiapan, kebijakan internal, serta tekanan pemangku kepentingan dalam penerapan pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, meskipun beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen yang relatif baik dalam pengungkapan aspek sosial, secara keseluruhan kualitas dan kelengkapan pengungkapan standar GRI 400 masih memerlukan peningkatan.

Tabel 4 Statistik Deskriptif

Statistik	Nilai
N	36
Minimum	0
Maksimum	0,75
Rata-rata(Mean)	0,28
Standar Deviasi	0,26

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 36 unit analisis. Nilai minimum indeks pengungkapan GRI 400 sebesar 0, yang mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan sektor energi yang tidak melakukan pengungkapan aspek sosial GRI 400 sama sekali dalam laporan keberlanjutannya. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,75 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan tertinggi yang dicapai perusahaan hanya sebesar 75% dari total item GRI 400 yang dianalisis, sehingga belum terdapat perusahaan yang mengungkapkan standar GRI 400 secara penuh.

Nilai rata-rata (mean) indeks GRI 400 sebesar 0,28 mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya mengungkapkan sekitar 28% indikator GRI 400. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan aspek sosial masih tergolong rendah, dan pengungkapan laporan keberlanjutan belum dilakukan secara komprehensif.

Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,26 menunjukkan adanya variasi pengungkapan yang cukup tinggi antar perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan dalam praktik pelaporan sosial, di mana sebagian kecil perusahaan telah mengungkapkan aspek GRI 400 relatif lebih luas, sementara sebagian besar perusahaan masih sangat terbatas atau bahkan tidak melakukan pengungkapan sama sekali.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti rata-rata hanya mengungkapkan 28% indikator GRI 400. Standar deviasi sebesar 0,26 menunjukkan adanya variasi pengungkapan yang cukup tinggi antar perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan aspek sosial dalam sustainability report perusahaan sektor properti masih belum merata dan belum komprehensif. Diperlukan peningkatan komitmen perusahaan serta penguatan peran regulator dalam mendorong pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar Global Reporting Initiative

#### DAFTAR PUSTAKA

- Deegan, C. (2019). *Financial accounting theory* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI standards*. Global Reporting Initiative. <https://www.globalreporting.org>
- Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: Stakeholders' influence and motivations. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535–552. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2014-0048>
- Guthrie, J., & Abeysekera, I. (2006). Content analysis of social, environmental reporting: What is new? *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 114–126. <https://doi.org/10.1108/14013380610703120>
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Hermawan, A., & Mulyawan, S. (2014). Pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 1–20.
- Lestari, A., & Rachmawati, S. (2019). Sustainability reporting pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10004>
- Pratiwi, D., & Prabowo, M. (2021). Analisis pengungkapan aspek sosial berdasarkan standar GRI 400 pada perusahaan non-keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 123–138. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art5>
- Raar, J. (2002). Environmental initiatives: Towards triple bottom line reporting. *Corporate Communications: An International Journal*, 7(3), 169–183. <https://doi.org/10.1108/13563280210436781>
- Sari, N., Putra, A., & Wibowo, R. (2022). Pengungkapan standar GRI 400 pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 67–82.
- Tarigan, J., & Samuel, H. (2014). Pengungkapan sustainability report dan kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 88–101. <https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101>



Violeta, E., Azmi, Z. & Suci, R. G. (2025). *Does sustainability report disclosure affect financial performance? Evidence from the Indonesia Stock Exchange*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 10(3), 310–317.  
<https://doi.org/10.22437/jaku.v10i03.47475>

